

PARTISIPASI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN KANAL DI KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Andhika Anwar^{1*}, Ansyari Mone², Sitti Rahmawati Arfah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the extent of government participation to empower the community in the canal environment in the jongaya village, tamalate district, Makassar city. This study used phenomenology with a qualitative research type that was explaining government participation in community empowerment in the canal environment in the jongaya village, the tamalate district, the city of Makassar. The total number of research informants was 3 people, m from the village office, the community around the jongaya canal area. Research information was collected through observation, interviews and documentation. The results showed there were several stages in the stages of government participation in community empowerment in the canal environment in the jongaya village, tamalate district, the city of Makassar.

Keyword: *participation, in empowerment, channels, local government*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan kanal di Desa Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menjelaskan partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan kanal di Desa Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jumlah informan penelitian adalah 3 orang, m dari kantor desa, masyarakat sekitar areal kanal jongaya. Informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa tahapan partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan kanal di desa jongaya kecamatan tamalate kota makassar.

Kata kunci: partisipasi, dalam pemberdayaan, saluran, pemerintah daerah

* andhikaanwar@gmail.com

PENDAHULUAN

Partisipasi Pemerintah menurut Heryanto (2015) merupakan sebuah perwujudan dari sebuah penerimaan aturan dan tata kelola untuk mengatur berbagai kepentingan dari berbagai urusan bisnis maupun pada pelayanan publik. Prinsip partisipasi pemerintah merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebenarnya awal mula partisipasi pemerintah muncul dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang di percayakan oleh masyarakat untuk menjadi penyelenggara segala pelayanan publik.

Partisipasi pemerintah memiliki prespektif yang berbeda-beda dengan adanya partisipasi pemerintah masyarakat mengharapkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik serta kurangnya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia berkurang. Pada sektor publik pemerintah sangat penting dalam memberikan tanggung jawab terhadap semua aktivitas kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Robinson dalam (Asrori: 2014) mengungkapkan pentingnya tolak ukur sektor publik yang terdiri dari tiga pengukuran yakni a) sebagai fasilitas

pembelajaran untuk perbaikan layanan pemerintah b) sebagai pembelajaran untuk memperbaiki praktek manajemen c) sebagai alat yang digunakan untuk melaporkan akuntabilitas dan transparansi.

Secara konseptual pemerintah yang baik mengandung dua pemahaman, yakni yang pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat. Dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan. Kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, yakni aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2017) Dalam konteks ini lebih menekankan cara pemerintah untuk mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas baik itu pada aspek politik, ekonomi dan secara administratif dalam pengelolaan negara baik itu pada semua tingkatan pemerintah. Hal ini sangat penting dikarenakan melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai penyeimbang pada kekuasaan pemerintah.

Pemerintah kepada masyarakat yakni memberdayakan, memberikan informasi. Sehubungan dengan pemberdayaan, tugas pemerintah tentu

juga tidak lepas dari tanggung jawab dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan yang mana didasari atas ketidak mampuan masyarakat baik itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pada pemberdayaan masyarakat ini pemerintah mengharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik demi terwujudnya cita-cita bangsa untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tentunya pemberdayaan masyarakat ini adalah agenda wajib yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya pada penanganan kegagalan yang telah berlalu. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat mampu secara mandiri dalam berpartisipasi dalam artian masyarakat mampu mengembangkan kapasitasnya baik itu pada kreasi-kreasi yang dihasilkan, serta mampu mengontrol dan mengendalikan lingkungan dan sumber daya yang dimiliki sendiri, serta mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan ikut dalam proses politik misalnya ikut berpartisipasi membantu proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2013)

Dalam pemberdayaan lingkungan, pemerintah diharapkan melakukan sinergitas bersama masyarakat terkait

dengan pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana seharusnya lingkungan tentunya digunakan sebagai dasar pembangunan sebuah tempat dan daerah. Pada proses ini perlu adanya penjagaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap mampu menunjang kehidupan yang normal. Kebersihan lingkungan merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tanpa sampah dan kotoran tentu akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, kebersihan yakni merupakan sebuah cerminan perilaku yang sangat penting bagi individu dalam setiap individu, membantu masyarakat untuk hidup nyaman dan melakukan aktivitas dengan mudah.

Kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan pada lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebagai individu yang berhubungan pada setiap aspek maka dari itu masyarakat harus mampu memelihara kebersihan lingkungan sebab tanpa adanya lingkungan yang sehat dan bersih akan menimbulkan kerugian tentunya bagi masyarakat sendiri.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan berdasarkan regulasi tersebut sehingga pemerintah

tentunya memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan yang sehat dan bersih, namun lingkungan tidak hanya keterlibatan pemerintah sendiri namun juga harus ada partisipasi dari masyarakat sekitar untuk menjadikan lingkungannya menjadi bersih nyaman dan sehat peneliti ini yakni dengan konsentrasi pemberdayaan pemerintah pada masyarakat sekitaran kanal Jongaya.

Berdasarkan observasi awal aliran kanal tersebut sangat mengganggu kegiatan dan aktivitas masyarakat sekitar, walaupun pemerintah telah melakukan pembersihan kanal namun masyarakat masih belum mampu berpartisipasi dengan baik, dalam waktu singkat kanal kembali kotor tertimbun sampah, menimbulkan bau busuk dan pada saat musim hujan tidak sedikit kemungkinan terjadi luapan dikarenakan kurangnya perawatan pada aliran kanal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat dan pemerintah seharusnya bekerja sama untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan sekitarnya dan menjaga serta melindungi kesehatan lingkungan oleh sebab itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat judul

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerjapekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian "*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*", artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau

mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi

(2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 15 mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan, 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh

informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain

Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Partisipasi (*Participation*) Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah

disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa

sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan

menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini;

Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangan a sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; paraprofesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti

Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis

Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis

dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan

Angell seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan.

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian.

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal

dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Di gunakan ialah penelitian deskriptif Jenis penelitian yang kualitatif. Yang dimana jenis penelitian melalui pemaparan dan ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkannya suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah

barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kelurahan

| Jumlah Penduduk Kelurahan | | |
|---------------------------|-------|------------|
| L | P | Keterangan |
| 7.822 | 7.856 | 15.678 |
| Jumlah | | 15.678 |

Dari tabel diatas mengenai kependudukan di kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate kota Makassar yang mempunyai jumlah penduduk

15.678 dapat di simpulkan bahwa penduduk di wilayah tersebut dengan wilayah yang sempit mencakup rumah warga yang sangat padat penduduk.

Tabel 2.
Jumlah Kebutuhan Penduduk

| No. | Kebutuhan Masyarakat | |
|-----|----------------------|------|
| 1. | Rumah | 1934 |
| 2. | Ruko | 89 |
| 3. | Tempat ibadah | 11 |
| 4. | Wihara | 15 |

Tahap Penayadaran Dan Pembentukan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama dilapangan terkait partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal dikelurahan Jongaya, terkhusus dalam tahap penayadaran dan pembentukan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam segala upaya-upaya dalam menayadarkan

dan membentuk masyarakat yang cinta lingkungan dan bahkan telah menyediakan sarana dan prasarana seperti mobil/motor pengangkut sampah yang nantinya akan dibawah dan dibuang ke TPA Antang.

Tahap Transformasi Kemampuan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama dilapangan terkait partisipasi pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal di Kelurahan Jongaya, terkhusus dalam tahap transformasi kemampuan pemerintah telah melakukan kegiatan ini dengan penuh keyakinan pencapaian tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan pembelajaran berupa seminar kebersihan lingkungan yang menghasilkan masyarakat akan sadar akan tanggung jawab atas penjagaan kebersihan pada lingkungan kanal di kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate kota Makassar.

Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama dilapangan terkait partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal di kelurahan Jongaya, terkhusus dalam tahap peningkatan kemampuan intelektual pemerintah telah melakukan kegiatan ini dengan penuh keyakinan pencapaian tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melakukan peningkatan kemampuan intelektual dengan mengevaluasi masyarakat tentang seminar kebersihan lingkungan yang telah menghasilkan masyarakat yang ramah lingkungan, masyarakat yang

akan sadar akan tanggung jawab atas penjagaan kebersihan pada lingkungan kanal di kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate kota Makassar.

KESIMPULAN

Tahap penyadaran dan pembentukan, sejauh ini dalam proses pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal pada tahap penyadaran dan pembentukan memerlukan suatu tindakan kesadaran dan suatu tindakan pembentukan untuk saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan kanal sehingga terdapat keserasian dalam mencapai hasil yang maksimal agar masyarakat akan jauh lebih sadar atas penjagaan lingkungan kanal sehingga menciptakan masyarakat yang mandiri yang bebas atas polusi yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Tahap transformasi Kemampuan, dalam tahapan ini terkait dengan partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal di kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam pemberian kemampuan sehingga hasil yang di peroleh lebih efektif dan memuaskan. Dengan adanya tahapan ini pemerintah telah melakukan

pemahaman wawasan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan pembelajaran seperti seminar kebersihan lingkungan. Dengan kegiatan ini pemerintah beranggapan masyarakat akan jauh lebih sadar akan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan kanal kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, dengan beberapa tahapan di atas yang membantu pemerintah terkait partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkungan kanal di kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. mulai dari tahapan penyadaran dan pembentukan, hingga ke tahapan transformasi kemampuan yang sangat mendorong adanya tahap peningkatan kemampuan intelektual yang dimana pada tahap ini adalah tahap lanjutan untuk pemberdayaan masyarakat. pada tahap ini dimana pemerintah telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menguatkan wawasan atas pemahaman dalam penjagaan lingkungan kanal pada kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. pemerintah telah menyukseskan kegiatan ini dengan meningkatkan segala pengetahuan masyarakat yang telah di peroleh, dan mampu menyesuaikan diri yang

berdampak baik bagi individu masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D., Siti Irene.(2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Adi, Isbandi rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustina, M & Christiawan, YJ. (2015). “ Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan”, *BUSINESS ACCOUNTING REVIEW*, Vol. 3, No. 1, pp. 223-232.
- Ahmad Mustanir, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling, Mutmainna. (2018) *Peran AparaturPemerintah Desadan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sindereng Rappang* Diperoleh dari

- <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Ambar, Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Anwas, M Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. (2014). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asti, dan Irvan Cholid. (2018) *Presepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDES di Kecamatan Kendawangan* Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 6 No 1, Juni 2018); halaman 1-14